

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Muhammad Umar Chapra terkait Kebijakan Moneter Islam tidak lepas dari strategi pengembangan moneter Muhammad Umar Chapra secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak memperbolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal *maupun rate return* (suku bunga). Kemudian sumber pengembangan moneter Islam adalah cara bagaimana menjamin bahwa suatu pertumbuhan moneter itu “cukup” tetapi tidak berlebihan, kiranya penting untuk memonitor secara berhati-hati ketiga sumber pengembangan moneter.
2. Peluang implementasi dari pemikiran Muhammad Umar Chapra terkait kebijakan moneter Islam, yaitu Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, peluang ini bisa dijadikan sebagai lahan yang prospektif untuk dijadikan sebagai obyek pengembangan ekonomi Islam dan sekaligus sasaran pasar dan pada tahap selanjutnya kapasitas penduduk muslim ini bukan saja menjadi objek pasar tetapi juga sebagai objek islamisasi ekonomi, sehingga semakin banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang ekonomi Islam, semakin banyak pula penduduk mendukung pengaplikasian praktik ekonomi Islam seperti nasabah bank syariah. Dalam hal ini, terdapat 3 instrumen kebijakan moneter pemikiran Muhammad Umar Chapra yang dapat diimplementasikan di Indonesia diantaranya cadangan wajib resmi, pembatasan kredit dan moral suasion.

B. Saran

1. Untuk merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan Negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan, harus berjalan seirama.

2. Bank Indonesia sebagai Bank sentral yang merupakan Otoritas moneter harus secara bertahap mengubah mindset (cara pandang) mereka dari operasi moneter konvensional ke operasi moneter ganda dan mulai memikirkan kemungkinan penggunaan retribusi syariah sebagai acuan policy rate "kebijakan tingkat pengembalian" untuk dapat mencapai tujuan utama dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan keadilan.

